

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
 24 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK.

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	1. Seminar; 2. Lokakarya; 3. Dialog interaktif; 4. Sarasehan; dan 5. Workshop.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	S A L D O			Rp.	

Mengetahui :
 KETUA UMUM / KETUA,
 (.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,
 (.....)

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690824 199903 1 001